

The Impact of Implementation of Government Accounting Standards on the Quality of Government Financial Reports

Ega Priscilla Rumapea¹, Evelin Demiana Lovely Napitupulu², Fatimah Zahra³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: egaprisillarumapea@gmail.com; evelindemianalovelynapitupulu@gmail.com; fatimah.fzahra21@gmail.com

ABSTRAK

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Kota Medan. 2. Mengetahui apakah Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kota Medan sudah memenuhi Standar akuntansi Pemerintahan. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal menurut Sugiyono: penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi. Artinya, pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dinas perkebunan dan peternakan provinsi sumatera utara sebagai tolak ukur penyusunan laporan keuangan serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana disebabkan oleh pihak-pihak tertentu. Dilihat dari nilai koefisien determinan yang ditunjukkan oleh Adjusted R square yaitu 0,842 menunjukkan bahwa 84,2% hal ini berarti sebesar 84,2% penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan badan pendapatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sedangkan sebesar 15,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Keyword: Standar Akuntansi Pemerintah; Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah; Asosiatif Kausal

ABSTRACT

The objectives to be obtained from this research are: 1. To determine the effect of implementing government accounting standards on the quality of financial reports of the regional government of Medan City Regency. 2. Find out whether the Regional Financial Reports of Medan City Regency meet government accounting standards. Type of Research This research is causal associative research according to Sugiyono: research that aims to analyze the causal relationship between independent variables, namely variables that influence and dependent variables, namely variables that are influenced. This means that in this study, researchers want to know and provide empirical evidence about the effect of implementing government accounting standards on the quality of financial reports in accordance with PP number 71 of 2010 at the North Sumatra Province Plantation and Livestock Service. In achieving the objectives that have been set to find out whether the implementation of government accounting standards has an effect on the quality of the financial reports of the North Sumatra Province Plantation and Livestock Service as a benchmark for preparing financial reports and to prevent deviations caused by certain parties. Judging from the determinant coefficient value shown by the Adjusted R square, namely 0.842, it shows that 84.2%, this means that 84.2% of the implementation of government accounting standards has an effect on the quality of the financial reports of the North Sumatra Province Plantation and Livestock Service revenue agency, while it is 15.8 % explained by other factors not examined in this study.

Keyword: Government Accounting Standards; Quality of Government Financial Reports; Causal Associative

Corresponding Author:

Ega Priscilla Rumapea,
Universitas Negeri Medan,
Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221, Indonesia
Email: egaprisillarumapea@gmail.com



1. INTRODUCTION

Menyikapi tuntutan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, maka instansi pemerintah wajib mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Agar dapat akuntabel, diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan standar akuntansi pemerintahan yang dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar akuntansi tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi sektor publik yang memuat rumusan rinci mengenai unsur-unsur standar akuntansi. Pernyataan-pernyataan tersebut disebut dengan pernyataan standar akuntansi sektor publik, yang dalam pemerintahan disebut dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP). Pemerintah bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan, yang merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan organisasi. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan tersebut. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah adalah salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan. Pelaporan keuangan itu sendiri harus dilakukan secara tepat, jelas, dan terukur.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik oleh pemerintah juga akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik. Pengawasan yang maksimal dan optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah tentu akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara tepat dan wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan pemerintah. Laporan keuangan yang berkualitas pun dapat menjadi ukuran akuntabilitas dan transparansi pemerintah itu sendiri.

Meskipun berbagai peraturan perundang - undangan tentang pengelolaan laporan keuangan sudah memadai, namun masih terdapat beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Penyelenggaraan sistem keuangan sendiri tidak dapat dipisahkan dari mesin administrasi itu sendiri. Hal ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah itu sendiri.

2. LITERATURE REVIEW

A. *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP No.71 Tahun 2010*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan penyempurnaan dan penggantian dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan ini mengatur tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan, yang dikembangkan berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi nilai-nilai demokrasi, pemberdayaan, dan pelayanan dalam penerapan standar akuntansi, serta untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

1) PSAP No. 1 (Penyajian Laporan Keuangan)

PSAP No. 1 mengatur bahwa laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, yang berarti pendapatan diakui saat terdapat hak untuk menerima kas (meskipun belum diterima), sementara beban diakui saat kewajiban untuk membayar timbul (meskipun belum dibayar). Selain itu, asset, kewajiban, dan ekuitas juga diakui berdasarkan kriteria akrual.

Komponen utama laporan keuangan pemerintah yang diatur dalam PSAP No. 1 meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Yaitu menunjukkan penggunaan anggaran sepanjang periode tertentu. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yaitu menggambarkan perubahan saldo anggaran yang terjadi dari awal hingga akhir periode. Neraca yaitu Menyajikan posisi keuangan pemerintah pada akhir periode, termasuk asset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan Operasional yaitu Memberikan informasi tentang operasi dan kegiatan pemerintah. Laporan Arus Kas yaitu Menunjukkan aliran masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Laporan Arus Ekuitas yaitu Menggambarkan perubahan dalam ekuitas pemerintah selama periode. Catatan Atas Laporan Keuangan yaitu Menyajikan informasi tambahan dan penjelasan yang mendukung laporan keuangan utama.

Penerapan basis akrual dan penyusunan laporan keuangan yang terstruktur ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi yang disediakan kepada pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan.

2) PSAP No. 2 (Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas)

Laporan realisasi anggaran adalah dokumen yang menggambarkan secara detail bagaimana sumber daya ekonomi dialokasikan oleh pemerintah pusat atau daerah telah digunakan selama periode tertentu. Laporan ini mencakup perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan atau pelaksanaan sesungguhnya dari berbagai kegiatan dan program pemerintah.

Dalam laporan ini, disajikan informasi mengenai sumber – sumber pendapatan yang telah diterima serta penggunaan dana untuk berbagai keperluan seperti belanja operasional, pemabngunan, pembayaran utang, dan lain sebagainya. Laporan realisasi Anggaran bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci kepada pemangku kepentingan tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya publik.

3) PSAP No. 3 (Laporan Arus Kas)

Laporan Arus Kas adalah sebuah laporan keuangan yang penting karena memberikan gambaran detail tentang bagaimana entitas mengelola dan menggunakan kasnya selama periode tertentu. Laporan ini mengidentifikasi sumber-sumber kas yang masuk, seperti penerimaan dari penjualan produk atau jasa, penerimaan pinjaman, dan investasi, serta menjelaskan penggunaan kas untuk berbagai keperluan seperti pembayaran biaya operasional, investasi dalam aset baru, dan pembayaran utang. Secara khusus, laporan arus kas dibagi menjadi tiga aktivitas utama:

- a) Aktivitas Operasional: Menunjukkan arus kas dari aktivitas inti atau rutin entitas, seperti penerimaan dari penjualan dan pembayaran untuk biaya operasional.
- b) Aktivitas Pendanaan: Merupakan arus kas dari kegiatan yang terkait dengan modal, seperti penerimaan atau pembayaran pinjaman.
- c) Aktivitas Investasi: Menyajikan arus kas yang timbul dari investasi dalam aset-aset jangka panjang, seperti pembelian atau penjualan properti, peralatan, atau investasi keuangan.

Tujuan utama dari penyusunan laporan arus kas adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana kas telah digunakan dan dikelola oleh entitas selama periode akuntansi tertentu, serta untuk memperlihatkan saldo kas pada akhir periode sebagai informasi yang penting bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan finansial.

4) PSAP No. 4 (Catatan Atas Laporan Keuangan)

PSAP No. 4, yang mengatur mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), adalah bagian integral dari laporan keuangan pemerintah yang memberikan informasi tambahan yang mendalam mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan ini dapat berupa penjelasan naratif, analisis mendalam, atau daftar terinci yang menguraikan komponen-komponen tertentu dari laporan keuangan.

Tujuan utama dari penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan tingkat transparansi dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana informasi keuangan telah disusun dan diinterpretasikan. Dengan menyediakan detail tambahan dan penjelasan yang mendalam, CaLK membantu pemangku kepentingan, seperti masyarakat umum, regulator, dan investor, untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

B. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia diberlakukan untuk pemerintah pusat dan daerah oleh pemerintah. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) kemudian dikeluarkan untuk menjelaskan standar ini, yang disusun oleh komite khusus agar lebih mudah dipahami. Dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan, lembaga sektor publik diwajibkan mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan.

C. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah memiliki tujuan utama untuk memfasilitasi proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya standar ini, informasi keuangan pemerintah dapat disusun dengan cara yang konsisten dan komprehensif, memungkinkan perbandingan yang adil antara tahun-tahun anggaran dan antar entitas pemerintah.

Selain itu, implementasi standar akuntansi pemerintah juga berdampak signifikan pada tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Transparansi mengacu pada ketersediaan informasi keuangan secara jelas dan terbuka kepada publik, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik bagaimana dana publik dikelola dan digunakan. Sementara itu, akuntabilitas mengarah pada kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan keuangan dan pengelolaan sumber daya publik secara efektif.

Dengan standar akuntansi yang jelas dan diikuti oleh semua entitas pemerintah, diharapkan bahwa laporan keuangan akan mencerminkan kesehatan keuangan yang sebenarnya serta mengindikasikan keberhasilan atau tantangan dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini menciptakan dasar

yang kuat untuk evaluasi kinerja keuangan pemerintah dan dapat menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan untuk kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat.

D. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Robert & Vijay dalam Nurlaila (2014:31), keefektifan suatu sistem dapat dinilai dari sejauh mana output yang dihasilkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hubungan antara output pusat dengan pertanggungjawaban dan tujuan yang dituju menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas sistem. Implementasi standar akuntansi pemerintahan harus memastikan kemampuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang diperlukan.

E. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dokumen yang mencakup informasi tentang kondisi keuangan suatu organisasi. Perusahaan menyusun atau mengeluarkan laporan keuangan berdasarkan hasil proses akuntansi, yang kemudian disampaikan kepada pihak-pihak internal dan eksternal yang berkepentingan terkait keuangan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tahun 2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan adalah representasi terstruktur mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan sebuah entitas. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah dokumen penting yang mencatat transaksi dan arus kas perusahaan.

F. Laporan Keuangan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa "laporan keuangan" adalah laporan yang struktural mengenai posisi keuangan dan transaksi entitas pelaporan. Informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan dari entitas tersebut tercermin dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah pusat merupakan salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian sumber daya keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah.

G. Tujuan Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan entitas yang melaporkan serta segala transaksi yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan terutama untuk menilai nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam operasi pemerintah, mengevaluasi kondisi keuangan, mengukur efektivitas dan efisiensi entitas yang melaporkan, serta untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

H. Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pemerintahan yang menerapkan standar akuntansi pemerintahan secara efektif akan menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan dalam lingkungan pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, implementasi standar akuntansi pemerintahan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan suatu pemerintahan. Dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baik dan sesuai dengan pedoman, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dan disajikan memiliki kualitas yang baik, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan

I. Kerangka Konseptual

Penelitian berupaya mengaitkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan (seperti penyusunan anggaran, eksekusi anggaran, pembukuan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban) dalam Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, dengan tujuan untuk menilai kualitas laporan keuangan



Gambar 1. Kerangka Konseptual

J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah proposisi interim yang perlu diuji kebenarannya dalam suatu penelitian untuk memfasilitasi analisis masalah. Berdasarkan kerangka konseptual yang dijelaskan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H2: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

3. RESEARCH METHOD

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal, yang menurut Sugiyono (2010:37), bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen (yang mempengaruhi) dan variabel dependen (yang dipengaruhi). Metode penelitian ini digunakan untuk mengeksplorasi seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap perubahan dalam variabel dependen yang sedang diamati

B. Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

C. Populasi dan Sampel Populasi

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pegawai yang bekerja di sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.

2) Sampel

Penelitian ini melibatkan keseluruhan karyawan yang bertugas dalam bidang keuangan di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Partisipan penelitian terdiri dari staf pengelolaan keuangan, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 35 orang. Latar belakang pemilihan metode pengambilan sampel jenuh adalah karena jumlah populasi yang dikategorikan kecil, yaitu kurang dari 100 orang.

D. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

1) Variabel Dependen (Terikat)

Menurut Sugiyono (2011:60), variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Dalam konteks penelitian ini, variabel dependen (Y) adalah kualitas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang diukur melalui indikator-indikator seperti relevansi, keandalan, komparabilitas, dan kejelasan.

2) Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen (X), menurut Sugiyono (2011:61), adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel independen (X) adalah implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan.

E. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:35), metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk menginvestigasi populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Dalam penelitian ini, data kuantitatif digunakan karena disajikan dalam bentuk angka yang merupakan hasil dari pengukuran menggunakan skala Likert. Pengukuran atau penilaian variabel dilakukan sebagai berikut:

- a) Jika responden menjawab "5" berarti Sangat Setuju, diberi nilai 5.
- b) Jika responden menjawab "4" berarti Setuju, diberi nilai 4.
- c) Jika responden menjawab "3" berarti Netral, diberi nilai 3.
- d) Jika responden menjawab "2" berarti Tidak Setuju, diberi nilai 2.
- e) Jika responden menjawab "1" berarti Sangat Tidak Setuju, diberi nilai 1.

2) Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer. Data primer adalah informasi penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh para responden, yakni seluruh pegawai yang bekerja di kantor Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.

F. Teknik pengumpulan data

1) Kuesioner

Menurut sugiyono (2012:192) "Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis responden untuk dijawab". Jadi kuesioner dalam penelitian ini berisi tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan (X) dan serta kualitas laporan keuangan (Y).

G. Metode Analisis Data

1) Statistik Deskriptif

Sugiyono (2012:141) menjelaskan bahwa statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa

maksud membuat kesimpulan umum atau generalisasi. Dalam penelitian yang dilakukan pada seluruh populasi (tanpa pengambilan sampel), statistik deskriptif akan digunakan dalam analisisnya. Namun, jika penelitian dilakukan pada sampel, maka analisis dapat menggunakan baik statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif digunakan ketika peneliti hanya ingin mendeskripsikan data dari sampel tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk seluruh populasi dari mana sampel diambil. Jika peneliti bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial.

2) Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum melakukan analisis data, peneliti menguji instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

a) Uji Validitas

Menurut Ghozali (2012:52), uji validitas digunakan untuk menilai keabsahan suatu kuesioner. Suatu kuesioner dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaan di dalamnya mampu mengungkapkan aspek yang sesuai dengan tujuan pengukuran kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan Pearson Correlation untuk menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dianggap valid jika tingkat signifikansinya kurang dari 0,05.

b) Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2012:47), reliabilitas digunakan untuk mengukur keandalan suatu kuesioner sebagai indikator dari variabel atau konstruk yang diukur. Suatu kuesioner dianggap reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,60, dan tidak reliabel jika nilai cronbach's alpha kurang dari 0,60.

H. Uji Hipotesis

1) Uji r²

Koefisien Determinasi (R squared) adalah ukuran seberapa besar variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (X). Menurut Wijaya (2012:104), koefisien ini mengindikasikan persentase variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model yang menggunakan variabel independen. Rentang nilai koefisien determinasi adalah antara nol hingga satu. Nilai yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan sebagian besar atau bahkan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2) Uji t

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen dalam model regresi. Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel atau nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel atau nilai Sig. lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

3) Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis Regresi Sederhana digunakan untuk mengukur tingkat hubungan, menentukan arah hubungan, dan mengestimasi variabel terikat ketika nilai variabel bebas diketahui. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis regresi sederhana untuk mengevaluasi dampak penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara.

Persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Dimana:

Y: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah a: Konstanta

X: Standar Akuntansi Pemerintahan b: Parameter yang diestimasi untuk X

4. RESULTS AND DISCUSSION

A. Analisis Deskriptif Kualitatif Variabel Penelitian

Tabel 1. Deskripsi Variabel Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1.1	36	3.00	5.00	4.5000	.73679
x1.2	36	2.00	5.00	4.4722	.73625
x1.3	36	1.00	5.00	4.3611	.93052
x1.4	36	3.00	5.00	4.4444	.73463

x1.5	36	3.00	5.00	4.4722	.60880
x1.6	36	3.00	5.00	4.4167	.64918
x1.7	36	3.00	5.00	4.4444	.65222
x1.8	36	3.00	5.00	4.5278	.69636
x1.9	36	3.00	5.00	4.3889	.68776
x1.10	36	3.00	5.00	4.5278	.65405
y.1	36	2.00	5.00	4.5000	.73679
y.2	36	2.00	5.00	4.4167	.80623
y.3	36	1.00	5.00	4.4722	.84468
y.4	36	2.00	5.00	4.2778	.84890
y.5	36	2.00	5.00	4.4444	.77254
y.6	36	1.00	5.00	4.3333	.98561
y.7	36	2.00	5.00	4.5278	.77408
y.8	36	2.00	5.00	4.4722	.77408
y.9	36	2.00	5.00	4.5000	.77460
y.10	36	1.00	5.00	4.3611	.93052
Valid N (listwise)	36				

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Penerapan basis akrual untuk mengakui aset dalam neraca laporan keuangan SKPD di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mendapat penilaian dari responden maksimal 5 minimal 3 dan mean 3,5, standar deviation 0,73679
- 2) Penerapan basis akrual untuk mengakui aset dalam neraca laporan keuangan SKPD di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mendapat penilaian dari responden maksimal 5 minimal 2 dan mean 4,4, standar deviation 0,73625
- 3) Penerapan basis akrual untuk mengakui aset dalam neraca laporan keuangan SKPD di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mendapat penilaian dari responden maksimal 5 minimal 1 dan mean 4,3, standar deviation 0,93052
- 4) Penerapan basis akrual untuk mengakui aset dalam neraca laporan keuangan SKPD di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mendapat penilaian dari responden maksimal 5 minimal 3 dan mean 4,4, standar deviation 0,73463
- 5) Penerapan basis akrual untuk mengakui aset dalam neraca laporan keuangan SKPD di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mendapat penilaian dari responden maksimal 5 minimal 3 dan mean 4,47, standar deviation 0,6088
- 6) Penerapan basis akrual untuk mengakui aset dalam neraca laporan keuangan SKPD di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mendapat penilaian dari responden maksimal 5 minimal 3 dan mean 4,4, standar deviation 0,64918
- 7) Penerapan basis akrual untuk mengakui aset dalam neraca laporan keuangan SKPD di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mendapat penilaian dari responden maksimal 5 minimal 3 dan mean 4,4, standar deviation 0,66522
- 8) Penerapan basis akrual untuk mengakui aset dalam neraca laporan keuangan SKPD di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mendapat penilaian dari responden maksimal 5 minimal 3 dan mean 4,5, standar deviation 0,69636
- 9) Penerapan basis akrual untuk mengakui aset dalam neraca laporan keuangan SKPD di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mendapat penilaian dari responden maksimal 5 minimal 3 dan mean 4,3, standar deviation 0,68776
- 10) Penerapan basis akrual untuk mengakui aset dalam neraca laporan keuangan SKPD di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mendapat penilaian dari responden maksimal 5 minimal 3 dan mean 4,5, standar deviation 0,65405

Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan, Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Laporan keuangan menyediakan Informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai atau memperbaiki penilaian mereka terhadap peristiwa di masa lalu. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 2 dan dengan mean 4,5 standar deviation 0,73679
- 2) Laporan keuangan menyediakan Informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai atau memperbaiki penilaian mereka terhadap peristiwa di masa lalu. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 2 dan dengan mean 4,4 standar deviation 0,80623
- 3) Laporan keuangan menyediakan Informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai atau memperbaiki penilaian mereka terhadap peristiwa di masa lalu. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 1 dan dengan mean 4,4 standar deviation 0,84468

- 4) Laporan keuangan menyediakan Informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai atau memperbaiki penilaian mereka terhadap peristiwa di masa lalu. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 2 dan dengan mean 4,2 standar deviation 0,84890
- 5) Laporan keuangan menyediakan Informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai atau memperbaiki penilaian mereka terhadap peristiwa di masa lalu. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 2 dan dengan mean 4,4 standar deviation 0,77254
- 6) Laporan keuangan menyediakan Informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai atau memperbaiki penilaian mereka terhadap peristiwa di masa lalu. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 1 dan dengan mean 4,3 standar deviation 0,98561
- 7) Laporan keuangan menyediakan Informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai atau memperbaiki penilaian mereka terhadap peristiwa di masa lalu. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 2 dan dengan mean 4,5 standar deviation 0,7708
- 8) Laporan keuangan menyediakan Informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai atau memperbaiki penilaian mereka terhadap peristiwa di masa lalu. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 2 dan dengan mean 4,4 standar deviation 0,77408
- 9) Laporan keuangan menyediakan Informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai atau memperbaiki penilaian mereka terhadap peristiwa di masa lalu. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 2 dan dengan mean 4,5 standar deviation 0,77460
- 10) Laporan keuangan menyediakan Informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai atau memperbaiki penilaian mereka terhadap peristiwa di masa lalu. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 1 dan dengan mean 4,3 standar deviation 0,93052

B. Uji Kualitas Data

1) Uji Realibilitas

Hasil analisis data pada tabel menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha (α) untuk setiap item variabel lebih besar dari 0,60, menunjukkan bahwa setiap item variabel tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Ini mengindikasikan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan untuk mengukur konsep-konsep yang diteliti. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji Realibilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.976	20

C. Uji Hipotesis

1) Uji R²

Tabel 3. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.920 ^a	.847	.842	2.76860

a. Predictors: (Constant), Totalx1

Berdasarkan hasil uji, koefisien determinasi adjusted R² sebesar 0,842 menunjukkan bahwa 84,2% penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sedangkan 15,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2) Uji t

Tabel 4. Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.774	3.467		-.800	.429
Totalx1	1.057	.077	.920	13.702	.000

a. Dependent Variable: Totally

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel, hasil output menunjukkan bahwa t hitung untuk variabel peran auditor internal adalah 13.702 sedangkan nilai t tabel sebesar 1.699. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung 13.702 > t tabel 1.699 yang berarti hipotesis alternatif (H_a) diterima, Hal ini mengindikasikan

bahwa penerapan standar akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

D. Uji Regresi Sederhana

$$Y = -2774 + 1057X$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Jika nilai standar akuntansi pemerintahan (X) adalah 0, maka Kualitas Laporan Keuangan akan memiliki nilai konstanta sebesar -2.774.
- b) Koefisien regresi untuk variabel standar akuntansi pemerintahan adalah 1.057 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa Audit internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendah peningkatan standar akuntansi pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan akan semakin menurun.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah telah berhasil dilakukan dengan efektif. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pravitasari (2015) yang berjudul "Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan pada unit kerja perangkat daerah telah berjalan dengan baik dan efektif.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan badan pendapatan dinas perkebunan dan peternakan provinsi sumatera ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan tersebut tidak hanya disusun dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, tetapi juga memberikan gambaran yang akurat tentang bagaimana setiap aktivitas di badan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, penerapan standar tersebut memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.

5. CONCLUSION

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- A. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh dalam mendukung kualitas laporan keuangan dinas perkebunan dan peternakan provinsi sumatera utara Standar ini tidak hanya menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat disebabkan oleh pihak-pihak tertentu.
- B. Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh Adjusted R square sebesar 0,842 menunjukkan bahwa sebesar 84,2% variasi dalam kualitas laporan keuangan Badan Pendapatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dapat dijelaskan oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan. Sementara itu, sekitar 15,8% sisa variasi dalam kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menegaskan pentingnya implementasi standar akuntansi pemerintahan sebagai faktor dominan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan, namun juga mengakui adanya faktor lain yang dapat memengaruhi hasil laporan keuangan yang tidak tercakup dalam penelitian tersebut.

REFERENCES

- Azwar Rivai Nasution. (2021). The Effect Of Implementation Of Accrual-Based Government Accounting Standards On The Quality Of Local Government Financial Reports. IJAFIBS : Sumatera
- Dhedy Triwardana. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD*. Cet 18. UNRI: Pekanbaru
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet 18. Alfabeta : Bandung
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Ulin Yasis. (2024). Influence of Government Accounting Standards, Systems Internal Control, Regulatory Compliance Legislation on Quality Financial Statements. International Journal of Science and Society : Surakarta
- Umar Sako. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Journal Of Accounting Science : Gorontalo
- Yosi Juita. (2023). *The influence of the application of government accounting standards and local government internal control on the quality of financial reporting information*. Indonesian Accounting Research Journal: Padang